



## ***External setting* di kawasan Pasifik Selatan sebagai tantangan politik luar negeri Indonesia era pemerintahan Joko Widodo (2014-2023)**

External settings in the South Pacific region as a challenge for Indonesian foreign policy in the Joko Widodo government era (2014-2023)

**Kadek Ari Sudana**

Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina

Email Correspondence: [ikadekari@gmail.com](mailto:ikadekari@gmail.com)

### ***Abstract***

*The South Pacific region is an area that neighbors and directly borders Indonesia via Papua New Guinea. Members from the South Pacific are Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, Fiji and Kanak which represents New Caledonia. Geopolitically, this area is very important for Indonesia because it is a neighbor and has a direct border. Especially in 2015 the regional organization Melanesian Spearhead Group (MSG) accepted the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), which is part of the Free Papua Organization, to become an observer member of the MSG. This research aims to examine challenges Indonesia's foreign policy in the South Pacific region during the President Joko Widodo (2014-2022). Qualitative research and descriptive Analysis methods that researchers use for this research use the concept of external situations and conditions (external settings) in the study of foreign policy. The results of this research are the first and main challenge, namely the development of the Papua issue in MSG and there is support from Vanuatu, inconsistent support from PNG and the Solomon Islands. Secondly, the Papua issue is also discussed at the civil society level such as Non-Governmental Organizations (NGOs), journalists, church council, activists and students. Thirdly, The South Pacific region is not dependent on Indonesia because economic relations and cooperation between Indonesia and the South Pacific region are very small.*

**Keywords:** Foreign Policy, External Setting, Jokowi, South Pacific

### **Pendahuluan**

Kawasan Pasifik Selatan secara geografis merupakan tetangga Indonesia dan berbatasan langsung dengan Indonesia melalui Papua Nugini. Kawasan ini terdiri dari Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji dan Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) Kanak yang merupakan perwakilan dari Kaledonia Baru yang belum merdeka dari Prancis. Salah satu

etnis yang dominan di negara-negara Pasifik Selatan adalah etnis Melanesia, selain Polinesia dan Micronesia (Kompas,2022). Melanesia menjadi etnis dominan dengan populasi sekitar 92,7 %, lalu Polinesia 2,5% dan Micronesia 0,3% (Thakur,1991). Kawasan ini terdiri dari negara-negara dengan kekuatan ekonomi politik “small-class” yang masih berjuang dan memiliki masalah dalam hal kurangnya pembangunan, ketidakstabilan politik, masih adanya kesalahan dalam pengelolaan dana dan pelayanan publik, demokratisasi dan, korupsi (Huffer, 2005).

Di kawasan ini telah berdiri organisasi regional Melanesian Spearhead Group (MSG). MSG pertama kalinya menyelenggarakan pertemuan Dewan Pimpinan Rakyat Forum Pasifik Selatan tahun 1986 yang selanjutnya pemimpin MSG setuju mengadopsi Prinsip kerjasama bersama pemimpin Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Kepulauan Vanuatu di Port Villa, Vanuatu. Selanjutnya MSG dibentuk pada tahun 1988 dengan ditandatanganinya Agreed Principles of Co-operation among Independent States of Melanesia di Port Vila, Vanuatu. MSG resmi menjadi organisasi sub-regional pada 23 Maret 2007 melalui Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group. Tujuan pendirian MSG adalah untuk mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar anggota, pertukaran budaya Melanesia, tradisi dan nilai, persamaan kedaulatan, serta kerja sama teknik guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, good governance, dan keamanan. Saat ini, organisasi ini beranggotakan Papua Nugini, Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon dan Kanak sebagai representasi dari Kaledonia Baru yang belum berdaulat penuh.

Presiden Jokowi yang terpilih di tahun 2014 merumuskan dan mencanangkan berbagai program dalam politik luar negeri. Madu (2017) menjelaskan dalam pidato pelantikannya pada bulan Oktober 2014, Jokowi menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terpadat ketiga, negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia dan ekonomi yang terbesar di Asia Tenggara akan terus menjalankan kebijakan luar negeri bebas dan aktif. Politik luar negeri bebas aktif harus didukung oleh kekuatan pertahanan yang baik dengan rencana modernisasi TNI, memperbaharui infrastruktur pertahanan yang masuk menjadi program nawacita Jokowi. Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya memperkuat poros maritim dunia sebagai orientasi baru politik luar negeri Presiden Jokowi. Cornnely (2014) menjelaskan bahwa Jokowi dalam pernyataannya menfokuskan politik luar negeri Indonesia kedalam empat hal. Pertama, mempromosikan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Kedua, menggunakan “middle power diplomacy” dalam mempengaruhi aturan global. Ketiga, memperluas keterlibatan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dan terakhir mereformasi kementerian luar negeri untuk fokus dan menekankan kerja dalam aspek diplomasi ekonomi. Terlihat Jokowi menekankan pentingnya keterlibatan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik yang tentu berhubungan langsung dengan politik luar negeri Indonesia di kawasan Pasifik Selatan yang sebagai pelaksanaan dalam fokus Jokowi di kawasan Indo-Pasifik, selain dikarenakan dekatnya kawasan ini dengan Indonesia yang berbatasan langsung melalui Papua Nugini dan Provinsi Papua.

Ada 2 hal yang harus menjadi catatan penting mengenai kawasan Pasifik Selatan. Pertama, kawasan ini merupakan tetangga langsung dengan Indonesia melalui Papua Nugini, namun hubungan dengan kawasan ini cenderung nilainya

yang paling kecil secara ekonomi dengan kawasan-kawasan lain yang bekerjasama dengan Indonesia. Kedua, bahwa kenyataan saat ini, isu Papua berkembang luas di kawasan Pasifik Selatan, baik dalam level regional di organisasi MSG, di level negara yaitu Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon dan tentu yang harus menjadi catatan adalah Vanuatu yang konsisten mendukung kemerdekaan Papua serta di tataran masyarakat sipil seperti jurnalis, tokoh politik lokal, aktivis LSM, tokoh gereja dan pendeta serta elemen lain dari masyarakat sipil yang semakin memperhatikan isu dan perkembangan konflik di Papua.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskripsi analitis dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, *display* dan pendeskripsian serta bagian terpenting yaitu analisis data (Creswell, 2010). Penelitian mengenai politik luar negeri Indonesia ditulis oleh Aaron (2014), Mangadar (2015), Weaterbee (2016), Cornelly (2015). Untuk polugri Indonesia di kawasan Pasifik Selatan penelitian sudah dikaji oleh Wanggai (2014), Elmslie (2015), Rusdi (2021), Afif (2020), Lawson (2021). Penelitian mengenai regional Pasifik Selatan dan Organisasi MSG ditulis oleh Cain (2015), Somare (2015), Stanley (2020), Heningham dan desmon Ball (1991), Webb dan Emslie (2014).

Konsep *external setting* dalam penelitian ini merujuk pada pengertian K.J Holsti (1982) menjelaskan ada tiga konsep untuk menjelaskan politik luar negeri. Pertama, politik luar negeri sebagai orientasi yang berisi sikap, persepsi dan nilai-nilai yang diambil dari pengalaman sejarah dan keadaan strategis yang menentukan posisi negara dalam politik internasional. Kedua, politik luar negeri sebagai rencana dan komitmen kongkrit yang dikembangkan agar situasi lingkungan internasional mendukung kebijakan politik luar negeri negara tersebut. Ketiga, politik luar negeri sebagai langkah-langkah yang diambil yang berhubungan dengan kejadian atau situasi lingkungan eksternal yang penting untuk direspons negara tersebut. Penelitian ini akan fokus pada variabel ketiga yaitu *external setting*. Situasi dan kondisi eksternal tersebut akan menjadi pertimbangan utama negara untuk mengambil sikap dan kebijakan dalam merespons atau merumuskan, memutuskan dan menjalankan politik luar negerinya. Dalam hal ini, situasi dan kondisi eksternal dapat dikatakan sebagai satu variabel yang penting untuk dianalisis untuk melihat politik luar negeri sebuah negara. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya (Rosenau, 1973). Kondisi eksternal ini bisa menjadi tantangan bagi polugri sebuah negara.

## Pembahasan

Ada beberapa tantangan dalam politik luar negeri Indonesia di kawasan Pasifik Selatan. Pertama berkembangnya isu Papua, di organisasi regional MSG. Hal itu tidak lepas dari upaya dan manuver United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) untuk mencari dukungan di kawasan Pasifik Selatan. Sebelumnya pada tahun 2013, West Papua National Coalition of Liberation

(WPNCL) sudah mengajukan diri untuk menjadi anggota MSG, namun aplikasi WPNCL ditolak oleh MSG dikarenakan masih terbelahnya faksi-faksi yang ingin memerdekakan Papua. Pada 1-6 Desember 2014 difasilitasi Vanuatu, faksi-faksi yang berjuang untuk kemerdekaan Papua mengadakan pertemuan. Faksi-faksi tersebut adalah ULMWP, yaitu The Federal Republik of West Papua (NRFPB), West Papua National Coalition of Liberation (WPNCL) dan West Papua National Parliament (WPNP). Pada pertemuan ini dicapai sebuah deklarasi yang disebut "Deklarasi Saralana", yang isinya menggabungkan (unifikasi) faksi-faksi yang berupaya memerdekakan Papua kedalam satu organisasi yang dinamakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Setelah mencapai kesepakatan unifikasi faksi-faksi yang memperjuangkan kemerdekaan Papua, dibawah payung ULMWP. Usaha ULMWP selanjutnya pada 4-5 Februari 2015 mengajukan aplikasi pendaftaran menjadi anggota MSG. Serangkaian lobi dan usaha yang dilakukan ULMWP baik sesudah menjadi ULMWP atau proses panjang unifikasi faksi-faksi tersebut membuahkan hasil. Pada pertemuan tingkat tinggi negara-negara anggota MSG ke-20 yang diadakan di Honiara, Kepulauan Salomon 19-26 Juni 2015, usaha ULMWP untuk mendapat tempat di MSG mendapat respons MSG, dengan diterimanya ULMWP menjadi anggota peninjau (observer).

Bukan hanya kali ini MSG menerima ULMWP yang merupakan anggota yang bukan dari negara yang sudah berdaulat, namun sebelumnya MSG sudah menerima Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) yang merupakan organisasi dari Kaledonia Baru yang masih mengupayakan Kaledonia Baru merdeka dari Prancis. Hal ini merupakan hal yang unik dari organisasi regional MSG, namun perlu dicatat bahwa hal ini menunjukkan dukungan yang besar dari anggota MSG yang sudah merdeka untuk kawasan lain yang belum merdeka di Pasifik Selatan seperti Kaledonia Baru dan Papua yang masih menjadi bagian dari Indonesia.

Selain itu, Organisasi ini satu-satunya organisasi regional yang memilih nama ras yaitu Melanesia ketimbang kawasan yaitu Pasifik Selatan. Hal ini menunjukkan kuatnya perasaan ras melanesia untuk menunjukkan eksistensinya karena banyak dari negara yang diisi oleh ras melanesia merupakan negara yang terjajah, hal ini merupakan semangat post kolonial. Hal inilah yang menjadi satu landasan berdirinya MSG untuk saling membantu dan bersolidaritas antar sesama ras melanesia. Solidaritas ini pula yang menjadi landasan ULMWP diterima sebagai anggota peninjau di MSG karena merupakan perwakilan ras melanesia di Papua yang dianggap oleh negara yang mendukung kemerdekaan Papua seperti Vanuatu masih dalam penjajahan Indonesia.

MSG menjadi sorotan baik oleh Pemerintah Indonesia maupun internasional dikarenakan memutuskan untuk menerima ULMWP yang merupakan bagian dari Organisasi Papua Merdeka di luar negeri. Secara langsung bagi pemerintah Indonesia hal ini tentu bagian dari gangguan terhadap kedaulatan Indonesia dan intervensi terhadap masalah dalam negeri Indonesia. Penerimaan ULMWP menjadi anggota peninjau di MSG tidak terlepas dari identitas organisasi ini yaitu etnis Melanesia. Kesamaan identitas Melanesia antara masyarakat di kawasan Pasifik Selatan dan Papua telah mendorong solidaritas dari MSG sebagai organisasi representasi negara-negara Melanesia untuk mendukung kemerdekaan Papua. Somare (2015) menjelaskan bahwa MSG

telah tumbuh menjadi kelompok penekan dengan menerima aktor non negara yaitu ULMWP. Penerimaan ini atas dasar solidaritas sesama etnis Melanesia dan secara langsung menekan Indonesia untuk menyelesaikan persoalan HAM di Papua dan kedepan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tidak melanggar HAM di Papua. MSG menjadi tempat dinamika untuk membicarakan dinamika isu Papua dan menjadi kelompok penekan bagi Indonesia.

Kedua, sikap negara-negara di Pasifik Selatan terhadap isu Papua. Vanuatu merupakan negara yang hingga saat ini konsisten mendukung kemerdekaan Papua. Di era Pemerintahan Joko Widodo, Vanuatu secara terbuka dan terang-terangan mendukung kemerdekaan Papua dan mendesak PBB untuk mengambil tindakan atas pelanggaran hak asasi kemanusiaan (HAM) di Papua. Perdana Menteri Vanuatu berpidato mengenai masalah Papua di forum internasional di depan Dewan Sidang HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 4 Maret 2014 telah menyuarakan untuk PBB ikut memperhatikan secara serius pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Pada 26 September 2021 di sidang tahunan PBB ke 76, PM Vanuatu kembali menyuarakan pelanggaran HAM di Papua dan meminta PBB untuk mengunjungi Papua dalam misi penyelidikan pelanggaran HAM (CNBC,2021). Kepulauan Solomon dan PNG cenderung inkonsisten dalam isu Papua. Kepulauan Solomon bersama Vanuatu pada Sidang Majelis Umum dan Dewan HAM PBB ke-71 mengangkat kasus pelanggaran HAM di Papua (Abrar, 2020).

Kepulauan Solomon juga pernah mendorong dialog antara Pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), bahkan menyatakan sanggup untuk menjadi pihak yang menjembatani dialog (Tempo,2016). Namun di beberapa pertemuan, Kepulauan Solomon sering inkonsisten dengan mendukung Indonesia, terlihat dalam sidang tahunan PBB 2023, Kepulauan Solomon memuji hubungan dengan Indonesia (CNN,2023). Papua Nugini (PNG) di bawah kepemimpinan PM PNG Peter O'Neill mengemukakan bahwa PNG harus menjadi pemimpin dalam dialog antara Indonesia dan pejuang kemerdekaan Papua di negara-negara Pasifik. Pernyataan ini dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2015, bertepatan dengan menghangatnya isu ULMWP di MSG (Radioonz,2015). Namun, pada tahun 2018, melalui Menlu PNG, menegaskan bahwa tidak akan mendukung keinginan Vanuatu dan MSG untuk membawa isu Papua ke PBB. Fiji merupakan negara yang konsisten mendukung Indonesia. Ketika pengajuan Indonesia menjadi associate member di MSG, Fiji menjadi negara yang mendorong MSG meningkatkan status keanggotaan Indonesia di MSG (Pamungkas,2017).

Vanuatu harus menjadi catatan khusus karena hanya Vanuatu satu-satunya negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Papua hingga saat ini. Vanuatu yang teguh mengaspirasikan kemerdekaan Papua Barat perlu ditilik pada konteks dalam negerinya yang masih secara legal menolak mengakui Papua Barat bagian dari RI. Vanuatu mempunyai sebuah UU yang mengikat kebijakan pemerintah Vanuatu yang dilandasi konsep Walter Lini "One talk belong to me" terhadap "Sosialisme Melanesia". UU ini mewajibkan Vanuatu mendukung kemerdekaan negara-negara bangsa Melanesia dari kolonialisasi. Penggagasan UU ini bermula dari konsep Walter Lini tentang Sosialisme Melanesia yang perlu diperbincangkan lebih dalam untuk melihat konteks dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat secara kaffah. Ungkapan Walter Lini yang

senantiasa tercatat dibenak dan terus diputar politisi lokal Vanuatu ialah "Vanuatu dan Melanesia merupakan sebuah satu kesatuan dan tidak akan bebas sampai negara Melanesia lainnya bebas secara politik." (Dreli,2014:10). Konsep yang kemudian menjema menjadi Ideologi Walter Lini selanjutnya menjadi ruh pemerintah Vanuatu untuk bersolidaritas kepada sebangsa Melanesia lainnya yang tersebar di Pasifik. Lebih jauh lagi merefleksikan UU inilah alasan fundamental kenapa isu Papua selalu diangkat dan dukungan tak terbendung Vanuatu kepada ULMWP begitu deras.

Isu Papua di Pasifik Selatan merupakan isu krusial dalam hubungan antar sesama negara anggota MSG atau khususnya negara kawasan Pasifik Selatan terutama mengenai isu HAM. Hampir semua negara anggota MSG mengungkapkan dan mengangkat isu Papua kedalam forum-forum internasional namun Vanuatu-lah yang paling vokal mengangkat isu mengenai Papua. Pemerintah termasuk elit politik dan akar rumput Vanuatu sejak lama menjadi pihak begitu sentimen dan pro-kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Lebih jauh pada tahun 1980 awal kemerdekaan Vanuatu, Papua Barat dijadikan sebagai instrumen penting dalam lanskap Politiknya. Pastor Walter Lini, sebagai Perdana Menteri Vanuatu dikala itu bahkan menyatakan negaranya tidak akan pernah benar-benar merasa merdeka sementara bagian Melanesia lainnya terutama Papua Barat tetap diduduki oleh kekuatan asing (Indonesia)(Elmslie,2019).

Saking besarnya pengaruh para pegiat Papua di Vanuatu, kehadiran mereka terus menerus disana ingin memastikan bahwa isu Papua selalu diliput dan diangkat oleh surat kabar dan media lokal Vanuatu dengan cara yang berbeda yang tidak serupa dengan negara Melanesia lainnya. Oleh karenanya isu Papua benar-benar intensif dan agenda politik dalam luar negeri Vanuatu. Kadangkala Kepala Dewan Adat Vanuatu menjadikan krisis politik sebagai kekuatan politik tertinggi Vanuatu dalam mengkampanyekan dukungan untuk Papua, hal ini menjadikan isu Papua mengakar ke masyarakat mulai dari elit politik sampai kepada rakyat sipil (Elmslie,2019). Bahkan saking dalamnya pengaruh isu Papua selama bertahun-tahun di dalam benak masyarakat Vanuatu, Mantan Perdana Menteri Vanuatu Sato Kilman dan aktor yang berperan penting dalam perolehan status negara pengamat MSG untuk RI dia terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya melalui mosit tidak percaya Parlemen Vanuatu. Mosi ini terlahir dengan konsekuensi kedekatannya yang erat dengan RI yang ditakutkan akan mempengaruhi internal Politik Vanuatu khususnya. Vanuatu merupakan aktor negara yang tunggal dari 194 negara anggota PBB paling vokal, membela dan menyuarakan dukungan kemerdekaan Papua di PBB dan organisasi lainnya. Negara-negara Pasifik Selatan. Dari total 194 negara anggota PBB ini masih menganut sistem "one country one vote", 14 negara dari kawasan Pasifik dan 4 negara diantaranya merupakan anggota MSG (Kemenlu,2013).

Ketiga, perbincangan mengenai Papua tidak hanya berada di tataran elit politik di kawasan Pasifik Selatan, namun isu Papua lebih luas dibicarakan di tataran masyarakat sipil seperti pemimpin politik lokal, jurnalis, komunitas, gereja dan para aktivis (Lawson&wanggai,2021). Di Kepulauan Solomon, pimpinan gereja yang mempunyai jaringan cukup luas menyampaikan dukungan gereja dan rakyat Kepulauan Solomon kepada proses perjuangan kemerdekaan

Papua. Secara Resmi Uskup Agung Honiara, ibukota dari Kepulauan Solomon Bapa Peter Houhou menyampaikan “ We in the Solomon Islands have heard the cries of the people of West Papua and we commit to advocating for their inherent right to gainful political self determination and true freedom” (Dreli, 2014: 43). Di PNG, dilatarbelakangi kerusuhan rasial yang terjadi di Papua, 2 gubernur provinsi di Papua Nugini yaitu Gubernur Port Moresby Powes Parkop dan Gubernur Provinsi Oro Gary Guffa bersama ribuan orang mengadakan long march untuk menyuarakan keprihatinan terhadap kerusuhan rasila yang sedang terjadi di Papua dan mendukung penentuan nasib sendiri untuk bangsa Papua (New Zealand Radio, 2019).

Selain itu, Pada tahun 2021, mahasiswa di PNG juga mendukung kemerdekaan Papua (Gatra,2021). Dukungan yang besar terhadap Papua oleh masyarakat sipil di Papua Nugini merupakan hasil interaksi yang cukup lama karena berulangkali pengungsi dari Papua melarikan diri dan mengungsi ke negara Papua Nugini. Dukungan yang luas dari masyarakat sipil terhadap perjuangan kemerdekaan Papua saat ini tidak terlepas dari aktivis OPM dalam propaganda menggunakan media sosial dan jejaring internet di kawasan Pasifik Selatan dengan menyebarkan propaganda, tulisan, foto dan video seperti foto mengenai isu rasial, pelanggaran HAM dan kekerasan yang dilakukan aparat TNI-Polri, demonstrasi dan protes masyarakat Papua (Samad, 2021, Purwanto, 2017, Nainggolan, 2016, Sutomo, 2021, Siagian&Monica, 2021).

Saat ini, OPM juga menggunakan jejaring internet dan media sosial untuk menginternasionalisasi isu Papua dan mencari dukungan internasional terhadap kemerdekaan Papua. Penelitian di masalah ini dilakukan oleh Samad dan Permatasari (2021), Hadi (2017), Nainggolan (2016), Rochmiati (2021), Wibawa dan Hanita (2022). Berbagai penelitian ini menggunakan konsep framing isu. Analisis penelitian ini mempunyai kesamaan pembahasan dengan menjelaskan kampanye OPM melalui media sosial dan jejaring internet seperti akun twitter @freewestpapua yang terus berkampanye untuk kemerdekaan Papua dengan menyebarkan propaganda, tulisan, foto dan video seperti foto mengenai isu rasial, pelanggaran HAM dan kekerasan yang dilakukan aparat TNI-Polri, demonstrasi dan protes masyarakat Papua dan beragam materi propaganda lainnya. Kesimpulan penelitian ini, kampanye @freewestpapua dan akun-akun lain yang mendukung kemerdekaan Papua melakukan framing terbukti efektif di Kawasan Pasifik Selatan. Lantang dan Edwin (2020) dalam “The Internationalization of “West Papua” Issue and Its Impact on Indonesia’s Policy to the South Pacific Region” menggunakan konsep internasionalisasi dan framing isu. Penelitian ini menjelaskan OPM menggunakan media sosial untuk menginternasionalisasi persoalan Papua, terkhusus menasar masyarakat di kawasan Pasifik Selatan. Strategi ini dianggap berhasil dengan semakin meningkatnya solidaritas Melanesia dan dukungan untuk kemerdekaan Papua.

Pemerintah Indonesia saat ini semakin menyadari untuk mengontrol perihal media sosial dan jejaring internet di Papua. Muhnizar dan Monica (2020) menulis mengenai “Papua’s Internet Ban 2020: Politics, Information Democracy, and Digital Literacy”. Penelitian ini menggunakan konsep konflik dan kebijakan publik. Analisis penelitian ini menjelaskan ketika terjadi kerusuhan rasial di Papua pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia membatasi bahkan mematikan akses internet di Papua. Hal ini dilakukan pemerintah Indonesia dengan alasan

untuk mencegah hoaks yang beredar di masyarakat yang memicu kerusuhan. Kesimpulan penelitian ini secara kritis penulis melihat kebijakan pemerintah Indonesia ini agar kerusuhan ini tidak mendapat perhatian internasional yang bisa merugikan pihak pemerintah Indonesia.

Keempat, selama bertahun-tahun, kawasan Pasifik tidak menjadi prioritas dalam politik luar negeri Indonesia (Lawson&wanggai,2021). Faktor yang menghambat keterlibatan efektif Indonesia di kawasan Pasifik Selatan adalah Indonesia lebih mengutamakan hubungan regional di kawasan lainnya seperti ASEAN, Asia Selatan bahkan Eropadan Amerika. Hal ini lebih kepada nilai hubungan ekonomis yang masih sangat rendah di kawasan Pasifik. Nilai kerjasama Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan sangat kecil. Nilai kerjasama ekonomi terbesar Indonesia di kawasan Pasifik Selatan yaitu dengan PNG. Hal itupun dikarenakan Indonesia berbatasan langsung dengan PNG. Republik Indonesia (RI) dan Papua New Guinea (PNG) mulai merintis hubungan bilateral melalui hubungan konsuler sejak tahun 1973.

Pasca kemerdekaan PNG dari Australia dua tahun sesudahnya tepatnya pada 16 september 1975, hubungan ini ditingkatkan menjadi hubungan diplomatik yang lebih kuat. Kerjasama bilateral berfokus pada bidang pertahanan dan keamanan dilanjutkan sektor-sektor strategis lainnya semakin berjalannya waktu dan kualitas hubungan diperdalam dibidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan. Pemerintah RI menjadikan PNG sebagai salah satu mitra utama dalam menjalin kerjasama internasional ekonomi di kawasan Pasifik dan Osenia. Sebaliknya PNG juga memandang RI sebagai model bagaimana melakukan peningkatan pembangunan ekonomi dan kemitraan di kawasan Pasifik. RI-Papua Nugini meningkatkan kerjasama ekonomi yang lebih komprehensif sejak 2013. Selama 25 tahun, ekspor Indonesia terhadap PNG meningkat dengan rata-rata tahunan sebesar 7,38% dari US\$ 23,4 juta pada tahun 1995 menjadi US\$ 139 Juta di tahun 2020(Kemenlu,2022). Situasi perekonomian RI-PNG mengalami penurunan drastis akibat COVID-19 menjadikan dua negara melakukan pendekatan bilateral aspek ekonomi yang lebih intens. Hubungan keduanya meningkat tahun 2021 dari segi jumlah perdagangan seperti ekspor RI ke PNG sebesar USD 139 juta, sedangkan ekspor PNG ke RI USD 32,9 juta. Komoditas ekspor utama RI ke PNG yaitu gandum dan tepung Meslin USD 11 Juta; Pasta dan Kuskus senilai USD 10,6 juta dan Pupuk USD 9,26 juta. Sebaliknya komoditas ekspor PNG ke RI yaitu Vanili sebesar USD 20,1 juta dan biji Kakao sebesar USD 7,99 Juta (OEC,2020).

Angka perdagangan ekonomi RI-PNG belum terlalu signifikan sebelum pandemi COVID19 melanda, belum berfokus pada sektor ekonomi. Saat pandemik menghantam, neraca perdagangan kedua negara meningkat drastis, sejak tahun 2021 menjadi USD 322 juta. Pada tahun 2022 diproyeksikan jumlah neraca perdagangan senantiasa mengalami pertumbuhan yang didasari oleh kesepakatan sektor lain yang sedang dibangun. Pada pertemuan Maret 2022, RI-PNG bersepakat dalam kerjasama mencakup: kerjasama sektor energi perusahaan negara PLN dan PNG power yang membantu penyuplai listrik dar kota Jayapura (RI) ke Kota Panimo (PNG) lalu membuka jalur penerbangan Jayapura ke Port Moresby serta Merauke ke Port Moresby, selanjutnya kerjasama kepabeanan dan cukai RI-PNG serta kerjasama di Bidang Kemaritiman (OEC,2020).

---



Kerjasama keamanan RI dan PNG pernah mengalami hubungan pasang surut dikarenakan ada rasa curiga terhadap Indonesia dan sikap beberapa pihak kelompok intelektual PNG yang mendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) (Departemen Pertahanan RI,2001). Perbatasan darat sepanjang 760 km langsung PNG RI ini permulaan 1965 kerap memancing ketegangan diantara keduanya. Namun meskipun demikian hubungan erat tetap terjalin misalnya ketika Presiden Soeharto melakukan kunjungan bulan Juni 1979 sebagai kepala negara asing pertama di luar negara Kawasan Pasifik Selatan, RI dan PNG menandatangani Agreement on Technical Cooperation pada 5 Juni 1979, RI dan PNG juga menandatangani “Joint Border Committee” antar pejabat senior diantara kedua negara pada tahun 1979 (Departemen Pertahanan RI,2001).

Di dalam hubungan multilateral yang lebih tinggi, RI juga mendukung posisi PNG mendapatkan status negara observer dalam forum ASEAN. Dukungan RI atas keanggotaan PNG dalam APEC, Sebaliknya pemerintah PNG, secara resmi juga melarang aktivitas GPK/OPM yang berada didalam negaranya, PNG memiliki perang yang cukup signifikan dalam menggugurkan problem Irian Jaya dan Timor Timur pada sidang Dekolonisasi PBB, dan diantara yang terpentingnya adalah penandatanganan RI dan PNG, Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation di Ibukota Port Moresby pada 27 oktober 1986, menjadi landasan bagi kerjasama-kerjasam yang setelahnya mengalami perkembangan posistif di berrbagai hubungan kedua negara (Departemen Pertahanan RI,2001).

Hubungan dan kerjasama ekonomi yang rendah antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan ini mempunyai konsekuensi yaitu kawasan Pasifik Selatan tidak terlalu bergantung dengan Indonesia. Padahal jika kita kaji, ada peluang yang terbuka luas untuk kerjasama dikarenakan negara-negara di kawasan ini tergolong “small-power” yang masih membutuhkan kerjasama dan bantuan. Pola-pola ini sudah dilakukan oleh negara-negara seperti Australia, Selandia Baru bahkan saat ini Tiongkok, yang sudah sangat masif membantu dan bekerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Di tahun 2022 Tiongkok dan Kepulauan Solomon resmi menandatangani pakta keamanan komprehensif. Fakta-fakta dan perkembangan situasi di Pasifik Selatan harus menjadi catatan Indonesia. Namun, kembali lagi, nilai kerjasama yang kecil antara Indonesia dan kawasan Pasifik Selatan ini membuat negara-negara di kawasan ini tidak terlalu tergantung dengan Indonesia. Hal ini tentu yang kemudian akan diterjemahkan jika negara-negara di kawasan ini mendukung isu Papua dan memberi ruang untuk organisasi atau diaspora pro kemerdekaan Papua di kawasannya.

Secara konseptual dalam ekonomi-politik, jika dua negara mempunyai nilai kerjasama yang besar dalam hal ekonomi yang akan membentul “mutual interest”, kepentingan ekonomi yang menguntungkan kedua negara. Jika ini terjadi, maka konflik akan dihindari oleh dua negara karena resiko kerugian ekonominya akan sangat besar dan langsung berdampak pada ekonomi domestik kedua negara. Negara-negara dalam hal ini berupaya sekuat mungkin untuk menghindari konflik, bahkan jika konflik terjadi yang akan dilakukan adalah “wait and see”, tidak melakukan respons atau tindakan yang bisa memprovokasi ke hubungan yang lebih buruk. Hal inilah yang belum terbentuk antara hubungan Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang harus menjadi pekerjaan besar Pemerintah Indonesia, karena keberhasilan dan besarnya nilai

kerjasama akan berbanding lurus dengan meredanya dukungan terhadap kemerdekaan Papua di kawasan Pasifik Selatan.

## Penutup

Dalam kajian politik luar negeri, sangat penting untuk memahami situasi dan kondisi eksternal (External setting). Dalam proses perumusan polugri variabel *external setting* akan menentukan keputusan dan kebijakan apa yang akan diambil sebuah negara dalam polugri. Untuk itu, kemampuan memahami dan menganalisis situasi dan kondisi eksternal serta mengelola tantangan ini akan berhubungan dengan berhasil atau gagalnya sebuah negara untuk mengambil keputusan dan menjalankan polugri. Ada lima external setting di kawasan Pasifik Selatan yang menjadi tantangan bagi Indonesia. Pertama isu Papua yang bergulir dan dibahas di organisasi regional MSG dan ULMWP sebagai bagian dari OPM di luar negeri sudah menjadi anggota peninjau di MSG, yang artinya MSG menjadi satu satunya tempat terbuka untuk pertemuan Indonesia dan ULMWP.

Kedua adanya dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua dan inkonsistensi sikap Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. Vanuatu harus menjadi catatan khusus karena adanya ideologi solidaritas melanesia yang terus berkembang di kawasan ini dan UU yang memerintahkan pemerintah di Vanuatu untuk mendukung ras melanesia yang belum merdeka. Ketiga, dukungan terhadap kemerdekaan Papua dan diskusi-diskusi mengenai isu Papua juga berkembang luas di masyarakat sipil seperti pendeta, jurnalis, aktivis, LSM dan tokoh politik lokal. Hal ini tidak terlepas dari upaya OPM untuk menyebarkan isu Papua melalui internet dan media sosial yang menysasar masyarakat sipil di kawasan Pasifik Selatan. Terakhir, nilai kerjasama dan hubungan ekonomis antara Indonesia dan kawasan Pasifik Selatan yang masih sangat kecil sehingga membuat kawasan ini tidak terlalu tergantung dengan Indonesia. Namun, yang harus diperhatikan bahwa kawasan ini meski secara ekonomis tidak menguntungkan bagi Indonesia, namun secara politis sangat penting dikarenakan isu Papua yang terus berkembang dibahas di kawasan Pasifik Selatan.

## Daftar Pustaka

- Arbar, T. F. (2020). *Baiknya RI, Hibahkan Rp 29,41 M Bantu Pandemi 3 Negara*. Retrieved from [cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/news/20201217061705-4-209648/baiknya-ri-hibahkan-rp-2941-m-bantu-pandemi-3-negara/2](https://www.cnbcindonesia.com/news/20201217061705-4-209648/baiknya-ri-hibahkan-rp-2941-m-bantu-pandemi-3-negara/2).
- Arbar, T. F. (2020). Fakta Vanuatu Bikin Geram, 5 Kali Serang RI Soal Papua di PBB". *CNBC Indonesianews.com*. Diakses pada 19 Desember 2020 dari: [https://www.cnbcindonesia.com/news/20200928122734-4-189939/fakta-vanuatu-bikin-geram-5-kaliserang-ri-soal-papua dipbb](https://www.cnbcindonesia.com/news/20200928122734-4-189939/fakta-vanuatu-bikin-geram-5-kaliserang-ri-soal-papua-dipbb).
- Ball, D., Cole, R., Hegarty, D., Henningham, S., & Pimont, Y. (1991). *South Pacific security: issues and perspectives*. Canberra: Strategic and Defence Studies Centre, Research School of Pacific Studies, Australian National University, 1991.

Cain, T. N. (2015). *The renaissance of the melanesian spearhead group*. Diplomacy,

151.

- Connelly, A. (2014). *Indonesian foreign policy under President Jokowi*. Lowy Institute. Australia. Retrieved from <https://policycommons.net/artifacts/1345894/indonesian-foreign-policyunder-president-jokowi/1958044/> on 26 Feb 2023. CID: 20.500.12592/md9cpb.
- Dreli, Solomon. (2014). *The Influencing Factors of Melanesian Spearhead Group Standof West Papua Political Freedom*. Thesis Of MA Wallonia University, P 11,43.
- Elise Huffer (2005). *Governance, Corruption, and Ethics in the South Pacific*. The Contemporary Pacific. University of Hawai'i Press Volume 17, Number 1, Spring 2005 pp. 118-140. <https://muse.jhu.edu/pub/5/article/177464/summary>.
- Elmslie, J. (2015). *Indonesian diplomatic maneuvering in Melanesia: Challenges and opportunities. Regionalism, security and cooperation in oceania*. Honolulu: Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies.
- Elmslie, Jim (2019). *Indonesia Diplomatic Manuvering in Melanesia: Challenges and Opportunities*. Asia Pacific Center for Security Studies. Chapter 7 Regionalism Security and Cooperation in Ocenia.
- Fry, Greg (2015). *The New Pacific Diplomacy*. ANU Press, 327.2, p 152-153, diakses melalui <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/32853/603144.pdf?sequence#page=171>.
- Fry, G., & Tarte, S. (2016). *The New Pacific Diplomacy*. Australia: ANU Press.
- Holsti, K. J. (1982). *Restructuring Foreign Policy: A Neglected Phenomenon in Foreign Policy Theory*. In: K.J. Holsti, et al, *Why Nations Realign: Foreign Policy Restructuring in the Postwar World*. London: Allen & Unwin, pp. 1-20.
- Holsti, K. J. (1983). *International Politics, A Framework for Analysis*. 4th edition, International Edition, Prentice Hall.
- Isa. (2023). *Kenapa Timor leste dan pulau solomon kini puji RI di PBB*. Cnnindonesia.com. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230929142413-106-1005182/kenapa-timor-leste-dan-kepulauan-solomon-kini-puji-ri-di-pbb/2>.
- Lawson, S. (2016). *West Papua, Indonesia and the Melanesian Spearhead Group: competing logics in regional and international politics*. Australian Journal of International Affairs, 70(5), 506–524. <https://doi.org/10.1080/10357718.2015.1119231>.
- Madu, Ludiro. (2017). *Indonesia's Foreign Policy Under President Jokowi: More Domestic and Nationalist Orientations*. International Journal of Scientific Research in Science and Technology. Retrieved from scholar.google.co.id: <https://scholar.google.com/citations?hl=id>.
- Nainggolan, P.P. (2014). *International Activities of Papua Separatist Movement Aktivitas Internasional*. Jurnal Kajian DPR RI. 181-199.
- Rohmat. (2021). *Pemuda-pemudi papua dukung OPM, Bermain api? Gatra.com*. Retrieved from Gatra.com: <https://www.gatra.com/news-519176-politik-pemuda-pemudi-papua-nugini-dukung-opm-bermain-api.html>.

- Rosenau, James N. (1972) *The External Environment as a Variable in Foreign Policy Analysis*. In: James N. Rosenau et al. *The Analysis of International Politics*. New York: The Free Press, pp. 145-165.
- Samad, M. Y., & Permatasari, D. A. (2021). Memahami Organisasi Free West Papua Campaign Melalui Kampanye Dukungan Terhadap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Tergabung Dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(4), 401-412.
- Siagian, Muhnizar & Yulianti, M. S. (2021). *Papua's Internet Ban 2020: Politics, information democracy, and digital literacy*. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 37(3), 304-316.
- Stanley, D. (2000). *South Pacific Handbook*. USA: Avalon Travel Publishing.
- Sutomo, M., Dohamid, A. G., & Timur, F. G. C. (2022). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Pembungkaman Informasi Isu Papua Tahun 2021. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 2149-2158.
- Tempo. (2016). PM Kepulauan Solomon Dukung Dialog Indonesia Papua Merdeka. Retrieved from Tempo.com: <https://dunia.tempo.co/read/739382/pm-kepulauan-solomon-dukung-dialog-indonesia-papua-merdeka>
- Thakur, Ramesh. (1987). *Introduction to the South Pacific*. Auckland: Longman Paul, 1987. P.288. Publisher Macmillan, Palgrave, London: [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-12519-7\\_1](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-12519-7_1).
- Wangge, H. R., & Lawson, S. (2021). *The West Papua issue in Pacific regional politics: explaining Indonesia's foreign policy failure*. *The Pacific Review*, 1-29.
- Weatherbee, D. E. (2017). *Indonesia's foreign policy in 2016*. *Southeast Asian Affairs*, 163-176.
- Wibawa, G. S., Hanita, M., & Purwanto, W. H. (2022). Analisis Pola Propaganda terkait Isu Rasisme Papua di Ruang Siber. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(5), 1561- 1570.